

PETA ASPIRASI PESERTA DIDIK SMA DALAM MELANJUTKAN STUDI PADA KONTEKS TRANSFORMASI KEBIJAKAN SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SNPMB)

Bayu Anggoro Putro¹, Bella Nur Hidayah², Ju Linda Habibah³,
Novellia Ardhya Dewanti⁴, Fajar Wardoyo⁵, Ariefa Efianingrum⁶
bayuanggoro.2020@student.uny.ac.id¹, bellanur.2022@student.uny.ac.id²,
julinda.2021@student.uny.ac.id³, novelliaardhya.2021@student.uny.ac.id⁴,
fajarwardoyo.2021@student.uny.ac.id⁵, efianingrum@uny.ac.id⁶

Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Sistem pendidikan saat ini telah mengalami transformasi seiring tuntutan peradaban, salah satunya kebijakan SNPMB. Tujuan riset ini untuk memetakan aspirasi peserta didik SMA dalam melanjutkan studi pada konteks transformasi SNPMB dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai dasar pertimbangan evidence based policy. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subyek riset ini adalah peserta didik kelas 12 SMA Negeri 1 Lendah dan SMA IT Bina Umat. Metode pengumpulan data riset melalui observasi (participatory), wawancara (in-depth interview), dan dokumentasi. Analisis data riset diantaranya: (a) Bracketing; (b) Intuiting; (c) Analyzing; (d) Describing; dan (e) Interpretation. Diperoleh hasil temuan riset berupa: (1) Peta aspirasi peserta didik sesuai hierarki kebijakan pendidikan; (2) Implikasi aspirasi peserta didik pada konteks transformasi kebijakan SNPMB; dan (3) Rekomendasi kebijakan SNPMB di masa yang akan mendatang. Kesimpulan dari riset ini bahwa aspirasi peserta didik bersifat konstruktif dan langkah-langkah evaluasi SNPMB senantiasa harus memperhatikan: (a) Efektivitas, (b) Ketepatan, dan (c) Responsivitas.

Kata Kunci: Kebijakan SNPMB, Aspirasi, Peserta Didik.

ABSTRACT

The current education system has undergone a transformation in line with the demands of civilization, one of which is the SNPMB policy. The aim of this research is to map the aspirations of high school students in continuing their studies in the context of SNPMB transformation and identify influencing factors as a basis for considering evidence-based policy. This research uses qualitative methods with a phenomenological approach. The subjects of this research were grade 12 students at SMA Negeri 1 Lendah and SMA IT Bina Umat. Research data collection methods are through observation (participatory), interviews (in-depth interviews), and documentation. Research data analysis includes: (a) Bracketing; (b) Intuition; (c) Analyzing; (d) Describing; and (e) Interpretation. Research findings were obtained in the form of: (1) Map of student aspirations according to the education policy hierarchy; (2) Implications of student aspirations in the context of SNPMB policy transformation; and (3) SNPMB policy recommendations in the future. The conclusion from this research is that students' aspirations are constructive and SNPMB evaluation steps must always pay attention to: (a) Effectiveness, (b) Accuracy, and (c) Responsiveness.

Keywords: SNPMB Policy, Aspiration, Students.

PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023), bahwa pendidikan formal dalam implementasinya terbagi menjadi beberapa jenjang mulai dari pendidikan jenjang dasar, pendidikan jenjang menengah, dan pendidikan jenjang tinggi untuk menjamin setiap warga negara memiliki hak dalam memperoleh pendidikan. Mutu pelayanan pendidikan tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDG's) khususnya pada tujuan nomor empat, yaitu pendidikan yang berkualitas (Renanda, 2023). Sistem pendidikan yang ada saat ini telah

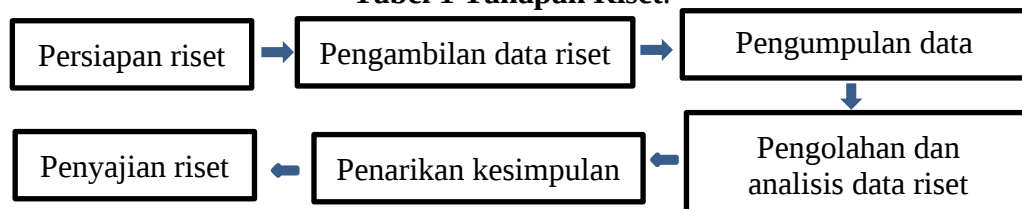
mengalami transformasi seiring dengan tuntutan peradaban. Salah satunya perubahan kebijakan adalah kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Prosedur pelaksanaan SNPMB 2023 didasarkan pada Permendikbud Nomor. 48 Tahun 2022, sedangkan transformasi kebijakan SNPMB 2024 sudah diperbarui melalui Permendikbud Nomor. 62 Tahun 2023.

Pihak penyelenggara kebijakan semula adalah Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT). Namun, saat ini ditangani oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3). Mengacu pada kebijakan SNPMB 2023 peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maupun peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) dan telah registrasi ulang dapat diterima pada seleksi jalur mandiri. Akan tetapi, pada tahun 2024 hal tersebut tidak diperbolehkan lagi. Kemudian, setiap peserta didik dapat memilih maksimal 4 program studi yang terdiri dari 2 program studi akademik sarjana dan 2 program studi diploma vokasi (D3/D4) pada SNPMB tahun 2024, sehingga menimbulkan dilema bagi peserta didik dalam menentukan aspirasi melanjutkan studi. Terdapat tiga model soal dalam UTBK-SNBT 2024, yaitu pilihan ganda, pilihan majemuk kompleks, dan melengkapi rumpang atau isian. Pada UTBK-SNBT sebelumnya hanya tersedia soal pilihan ganda. Transformasi kebijakan SNPMB tahun 2024 mengundang perhatian dikarenakan peserta didik harus beradaptasi dengan tuntutan kompetensi akademis serta memerlukan strategi yang matang untuk melanjutkan studi.

Sejatinya, pendidikan tinggi merupakan proses belajar untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan meningkatkan keterampilan (Rabani, 2023). Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) (dalam Girsang, 2023) menunjukkan data Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur 19-23 sebesar 28,96% pada tahun 2023. Rendahnya capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok umur yang lebih tinggi ini, selaras dengan riset Arum dan Adry (2020) yang menjelaskan hasil tingkat partisipasi sekolah akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) (2023), setiap tahun ada sekitar 3,7 juta peserta didik SMA, tetapi hanya 1,8 juta lulusan SMA yang melanjutkan studi. Hal ini yang menjadi dasar terlaksananya riset “Peta Aspirasi Peserta Didik SMA dalam Melanjutkan Studi pada Konteks Transformasi Kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB)” yang meliputi pemahaman, kemantapan/strategi, dan harapan (Hurlock, 2019) pada aspek access (akses), quality (kualitas), proficiency (kecakapan), dan equality/equity (kesetaraan/keadilan).

METODOLOGI

Tabel 1 Tahapan Riset.



Subjek, Lokasi dan Waktu Riset

Subjek dalam riset ini adalah peserta didik kelas 12 dari SMA Negeri 1 Lendah dan SMA Swasta Terpadu Bina Umat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan kedua sekolah tersebut berdasarkan pada hasil pemeringkatan UTBK nasional yang mana SMA Negeri 1 Lendah menduduki peringkat 924 dan SMA Swasta Terpadu Bina Umat menduduki peringkat 956 dari 1000 sekolah dan tracer study rendah (LTMPPT, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Aspirasi Peserta Didik SMA

Masalah-masalah kebijakan merupakan kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-kesempatan yang tidak teralisasi. William Dunn (dalam Pasolong, 2019) mendefinisikan peta aspirasi (pemahaman, kemantapan/strategi, dan harapan) sebagai diferensiasi aspirasi berdasarkan tingkat isu kebijakan diantaranya: (1) Major Issue yakni isu secara khusus yang ditemui pada tingkat pemerintah tertinggi. Isu ini berhubungan dengan pertanyaan misi lembaga; (2) Secondary Issue yakni isu yang berada pada tingkat instansi pelaksana program-program pemerintah pusat maupun berisi prioritas-prioritas program dan definisi kelompok-kelompok sasaran atau penerima dampak; (3) Functional Issue yakni isu yang terletak di antara tingkat program dan proyek serta usaha untuk memperolehnya; dan (4) Minor Issue yakni isu yang ditemukan terjadi pada tingkat-tingkat proyek spesifik meliputi personal atau petunjuk pelaksanaan serta peraturan.

1. Aspirasi Indikator Pemahaman

Pada indikator pemahaman, Kepala Sekolah menjelaskan bahwa dibutuhkan informasi spesifik terkait misi lembaga penyelenggara yang mengalami transformasi dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) menjadi Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) pada tahun 2024, sehingga memudahkan pemahaman dalam membimbing peserta didik. Aspirasi tersebut dapat dikategorikan sebagai isu mayor. Kemudian, dibutuhkan informasi yang akurat terkait transformasi mekanisme dan format soal pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) pada tahun 2024 yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Aspirasi tersebut termasuk dalam kategori isu sekunder. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum menyatakan bahwa dibutuhkan pemerataan akses informasi melalui sosialisasi yang interaktif secara luring pada setiap provinsi dari lembaga penyelenggara Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) dalam menjamin kesempatan pendidikan. Aspirasi tersebut terkategori sebagai isu mayor.

Selanjutnya, dibutuhkan informasi terkait transformasi format soal yang berbeda dengan kurikulum sekolah pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2024. Aspirasi tersebut dapat dikategorikan sebagai isu fungsional. Guru Bimbingan dan Konseling (BK) memaparkan bahwa dibutuhkan konsolidasi untuk proses penyamaan persepsi mengenai panduan dari Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3). Aspirasi tersebut termasuk dalam kategori isu fungsional. Peserta didik menyatakan bahwa dibutuhkan informasi terkait terjadinya transformasi pilihan program studi yang berbeda saat pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dengan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dengan tahun-tahun sebelumnya. Aspirasi tersebut terkategori sebagai isu sekunder. Selain itu, dibutuhkan informasi lebih awal dan uji coba secara berkala terkait transformasi soal dan alokasi waktu pengerjaan. Aspirasi tersebut dapat dikategorikan sebagai isu fungsional. Tidak hanya itu, juga dibutuhkan informasi secara detail terkait persentase indikator yang mempengaruhi kelulusan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan perubahan status kelulusannya, karena ditemukan perubahan status kelulusan setelah tanggal pengumuman yang ditetapkan. Aspirasi tersebut terkategori sebagai isu minor.

2. Aspirasi Indikator Kemantapan/Strategi

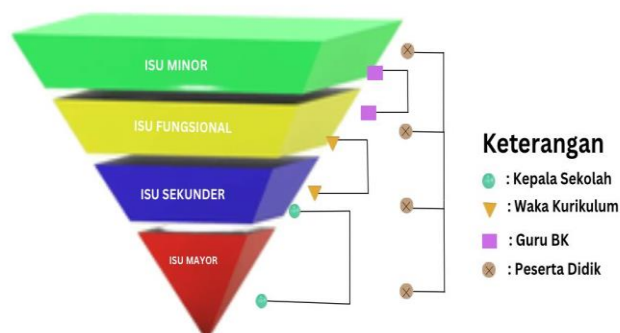
Indikator kemantapan/strategi, Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa dibutuhkan koordinasi dan kerja sama antara Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) dengan forum Kepala Sekolah dalam menjembatani rencana kegiatan, anggaran, dan fasilitas sekolah guna mempersiapkan peserta didik yang kompeten. Aspirasi tersebut merupakan isu mayor. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum mempertegas bahwa dibutuhkan kesiapan dan koordinasi dengan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) dalam

penyusunan dan pengembangan bahan ajar agar selaras dengan materi yang diujikan di Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Aspirasi tersebut termasuk dalam kategori isu sekunder. Guru Bimbingan dan Konseling (BK) memerlukan koordinasi dengan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) dalam meningkatkan kemampuan mengoperasikan fasilitas layanan, kinerja, dan motivasi yang berfungsi bagi peserta didik. Aspirasi tersebut tergolong dalam isu fungsional. Peserta didik menyatakan bahwa dibutuhkan peningkatan pemantauan dan pengawasan dari Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3), sebab masih terdapat permasalahan kebocoran soal Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dalam menjamin misi kredibilitas. Aspirasi tersebut termasuk dalam kategori isu mayor. Demikian pula, mekanisme penilaian dari Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) belum konsisten. Hal ini ditandai perbedaan transparansi penilaian antara Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dengan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), baik dari pilihan program studi dan pembobotan nilai. Aspirasi tersebut terkategori dalam isu fungsional.

3. Aspirasi Indikator Harapan

Indikator terakhir yaitu harapan, Kepala Sekolah menekankan bahwa pendidikan tinggi bukan menjadi kebutuhan tersier. Jika terdapat transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Baru (SNPB) semestinya dapat mengimbau kejelasan informasi, mekanisme, transparansi penilaian, dan rincian Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan data ekonomi peserta didik sebagai calon mahasiswa baru. Aspirasi tersebut dapat dikategorikan dalam isu mayor. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum mengungkapkan bahwa transformasi kebijakan Seleksi Nasional Mahasiswa Baru (SNPMB) perlu mempertimbangkan realisasi kebijakan berdasarkan kesiapan waktu dan sarana pembelajaran. Aspirasi tersebut tercakup dalam isu mayor. Guru Bimbingan dan Konseling (BK), menyatakan bahwa kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) penting untuk mempertimbangkan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling (BK) setiap sekolah. Aspirasi tersebut sebagai isu sekunder. Peserta didik menyatakan bahwa transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) perlu memperhatikan kesiapan dan monitoring kendala belajar peserta didik. Aspirasi tersebut dapat dikategorikan ke dalam isu minor.

Berdasarkan pemaparan data riset yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan subyek riset di dua sekolah yang berbeda setelah melakukan triangulasi sumber sebagai penguatan aspirasi peserta didik. Implikasi transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) dominan menimbulkan hierarki isu mayor (besar/krusial). Aspirasi tersebut sebagai refleksi dari self-efficacy peserta didik dan menjadi mediator penting dalam rekomendasi kebijakan (Kustiati, 2019). Peta hierarki aspirasi peserta didik dalam riset ini sebagai berikut:



Gambar. 1 Peta Hierarki Aspirasi

Relevansi Aspirasi Peserta Didik pada Teori Hurlock

Aspirasi merupakan harapan atau tujuan mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang, baik jangka pendek maupun panjang, yang bersifat positif atau negatif. Jika mengacu pada teori yang dinyatakan oleh Hurlock, peta aspirasi yang dikaji dalam riset ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (a) Akses (Access), masalah akses masih menjadi agenda utama (pokok) yang harus segera dituntaskan oleh lembaga penyelenggara (Anwar, 2022). Hierarki isu mayor ini mendeskripsikan terjadinya ketimpangan akses transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang meliputi informasi, kesempatan menjangkau, koordinasi, dan kredibilitas; (b) Kualitas (Quality) atau mutu yang amat berpengaruh pada output peserta didik. Rendahnya kualitas pendidikan berdampak pada kecilnya harapan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas. Hierarki isu sekunder mendeskripsikan ketimpangan kualitas transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang meliputi ketimpangan materi/soal pembelajaran, fasilitas pembelajaran, mekanisme seleksi, dan kompetensi SDM; (c) Kecakapan (Proficiency), yang menekankan pada potensi peserta didik yang perlu dikembangkan untuk kehidupannya. Akan tetapi, pada praktiknya isu fungsional masih terjadi, yang ditandai adanya ketimpangan kecakapan. Transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) berdampak pada alokasi waktu kebijakan, transparansi kebijakan, dan layanan kebijakan yang diterima oleh peserta didik; (d) Keadilan dan Keadilan (Equality/Equity), setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam pendidikan. Hierarki isu minor mendeskripsikan terjadinya ketimpangan kesetaraan dan keadilan peserta didik. Transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) memerlukan monitoring kesiapan peserta didik dan konsistensi kebijakan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aspirasi

Tendensi pemahaman, kemantapan/strategi, dan harapan SMA Negeri 1 Lendah lebih baik dari SMA Swasta Terpadu Bina Umat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi aspirasi merupakan situasi yang mengakibatkan terjadinya kendala, sehingga memerlukan solusi yang efektif (Yufarika, 2022). Berdasarkan riset ini, ditemukan faktor-faktor yang menghambat aspirasi peserta didik dan pihak sekolah sebagai berikut:

1. Kendala Peserta Didik

Kendala merupakan halangan atau rintangan yang membatasi pencapaian sasaran. Kendala peserta didik menjadi acuan timbulnya berbagai aspirasi yang mencakup pemahaman, kemantapan/strategi, dan harapan. Riset ini menemukan kendala-kendala yang dialami peserta didik sebagai berikut: (1) Transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru yang pesat menimbulkan kesulitan peserta didik dalam menyesuaikan sistem seleksi dan pembelajaran; (2) Transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang pesat menimbulkan kebingungan peserta didik untuk mencapai target melanjutkan studi di perguruan tinggi; (3) Transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang pesat menuntut peserta didik untuk memahami informasi kebijakan baru; dan (4) Transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) menimbulkan kesenjangan kesiapan akademik peserta didik saat ini dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Kendala Sekolah

Riset ini juga menemukan kendala-kendala yang dialami oleh pihak sekolah, diantaranya: (1) Transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Baru (SNPMB) yang pesat memerlukan investasi besar untuk Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Guru Bimbingan dan Konseling (BK), dan Guru-Guru lainnya untuk mengikuti pelatihan, sehingga mampu mengembangkan materi pembelajaran; (2) Transformasi kebijakan Seleksi

Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang pesat menimbulkan kendala yang berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Mengingat proses implementasi kebijakan terkait dengan faktor hukum, politik, sosial, dan budaya yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat, maka dibutuhkan pendekatan komprehensif; (3) Transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang pesat menimbulkan kesulitan bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Guru Bimbingan dan Konseling (BK), dan Guru-Guru lainnya untuk mengikuti perkembangan keahlian (minat/bakat) peserta didik yang cenderung fluktuatif; dan (4) Transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang pesat menuntut kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Guru Bimbingan dan Konseling (BK), dan Guru-Guru lainnya untuk cepat, tanggap dan akurat dalam memahami informasi mekanisme kebijakan.

Solusi/Rekomendasi Kebijakan

Solusi sangat penting dalam riset ini sebagai rekomendasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) di masa mendatang diantaranya:

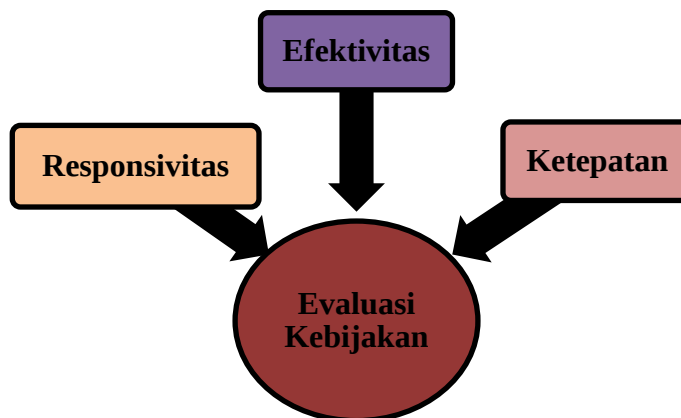
(1) Dalam mengatasi isu mayor untuk pemerataan akses yang meliputi informasi, koordinasi, dan kredibilitas, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) perlu turun tangan secara langsung dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap daerah (provinsi/kabupaten) dan LLDIKTI (provinsi) untuk menyebarluaskan informasi ke setiap SMA baik negeri maupun swasta tanpa terkecuali. Selain itu perlu koordinasi dengan stakeholder sekolah. Sosialisasi yang dilakukan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) secara online conference sudah efisien namun belum efektif; (2) Upaya mengatasi isu sekunder untuk peningkatan kualitas pendidikan, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) perlu berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap daerah (provinsi/kabupaten) memberlakukan konsolidasi dan pelatihan forum Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Guru BK dengan fokus kematangan peserta didik dalam melanjutkan studi tinggi. Selanjutnya, Kemendikbudristek, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap daerah (provinsi/kabupaten) melakukan crosscheck untuk memastikan kesiapan fasilitas pembelajaran peserta didik di sekolah dan penyamaan persepsi materi (kurikulum) dengan sub-test yang diujikan di SNBT, karena sekolah belum bekerja sama dengan bimbingan belajar secara optimal karena terbatasnya anggaran; (3) Solusi mengatasi isu fungsional (operasional) untuk meningkatkan kecakapan peserta didik, Balai Pengelolaan dan

Pengujian Pendidikan (BP3) dengan melakukan peningkatan responsibilitas (tanggap) melalui helpdesk “Halo SNPMB” karena masih banyaknya keluhan-peserta didik yang belum terjawab. Kemudian, konsisten dalam memberlakukan status kelulusan SNBP, format soal, dan tidak mendadak adanya transformasi alokasi waktu pengerjaan SNBT; dan (4) Dalam mengatasi isu minor untuk kesetaraan dan keadilan peserta didik Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap daerah (provinsi/kabupaten), maupun sekolah perlu melakukan koordinasi dalam menerapkan program khusus di sekolah, karena tidak selamanya sekolah menerapkannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh dalam riset ini yakni aspirasi dinyatakan sebagai harapan atau tujuan untuk mencapai suatu keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi riset ini merepresentasikan aspirasi pendidikan dalam menuntun kekuatan kodrat peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Aspirasi peserta didik dalam melanjutkan studi pada konteks transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) ini termasuk aspirasi

bersifat positif (konstruktif) dan berjangka panjang karena dampaknya akan dirasakan secara keberlanjutan.



Gambar. 2 Langkah-Langkah Evaluasi Kebijakan

Sumber: Arwildayanto (2018).

Selain pengkategorisasi aspirasi pada hierarki kebijakan, hasil riset juga berimplikasi pada langkah-langkah evaluasi kebijakan pendidikan agar senantiasa memperhatikan hal-hal berikut: (a) efektivitas, transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) seyogyanya melibatkan penilaian terhadap hasil belajar (kognitif, keterampilan, penyesuaian materi, dan sikap) peserta didik; (b) ketepatan, seyogyanya transformasi kebijakan Seleksi Nasional Mahasiswa Baru (SNPMB) melihat seberapa jauh hasil kebijakan yang akan dicapai dalam memecahkan masalah pendidikan; dan (c) responsivitas yakni transformasi kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) memuat preferensi atau nilai yang mengedepankan nilai-nilai etika, layanan, transparansi, partisipasi, dan keadilan).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saiful.A. 2022. Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan dalam Perpesktif Pendidikan Multikultural. Jurnal: Foundasia. 13(1): 1-15.
- Arum, Pangesti A., dan Adry Roza, M. 2020. Analisis Determinan Partisipasi Sekolah di Provinsi Jambi. Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan. 9(1): 10-21.
- Arwildayanto., Suking A., Wurni, T.S. 2018. Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif). Edisi Revisi. CV. Cendekia Press. Bandung.
- Girsang, A.P.L. 2023. Statistik Pendidikan. Edisi ke-12. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Hurlock, E.B. 2019. Perkembangan Anak. Edisi ke-6. CV. Erlangga. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. No.48 Tahun 2022. Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. No. 62 Tahun 2023. Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang.
- Kustiati, K.P., Sugiharto, D.Y.P., dan Anni, C.T. 2019. Minat Studi Lanjut ke Perguruan Tinggi Peserta didik Ditinjau Dari Self-Efficacy dan Aspirasi Orangtua. Jurnal: Psychocentrum Review. 1(1): 17-26.
- Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. 2022. Top 1000 Sekolah Tahun 2022 Berdasarkan Nilai UTBK. URL: <https://top-1000-sekolah.ltmpt.ac.id>. Diakses pada 18 Februari 2024.
- Pasolong, Harbani. 2019. Teori Administrasi Publik. Edisi ke-1. CV. Alfabeta. Bandung.

- Rachman, A., Yochanan., dan Ismaya, B. 2024. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Edisi ke-1. Saba Jaya. Karawang.
- Renanda, A.S. 2023. Karakteristik Demografis dengan Aspirasi Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi SMA. Skripsi. Universitas Lampung.
- Rusman., A. Hadi., dan Asrori. 2021. Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, dan Biografi. Edisi ke-1. CV. Pena Persada. Banyumas.
- Yufarika, Defi. 2022. Tantangan Dunia Pendidikan dan Implikasinnya Terhadap Perubahan Kebijakan. Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 2(2): 156-161..